



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA



Penyerahan **Penghargaan Keinsinyuran Daerah** **2026**

Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026

327 Pemerintah Daerah Peserta

Auditorium BRIN, Gedung B.J. Habibie
Jakarta, 29 Agustus 2026

LATAR BELAKANG

Mengapa Pengukuran IKD Perlu Dilakukan?

01

**Tantangan
Pembangunan
Semakin Kompleks**

Kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar terus meningkat.

02

**Porsi Belanja Daerah
yang Signifikan**

Memerlukan tata kelola teknis yang akuntabel untuk pembangunan infrastruktur.

03

**Perlu Ada Tolok Ukur
Kapasitas**

Perlu instrumen objektif untuk mengukur kepatuhan dan pembinaan Keinsinyuran.

Definisi, Tujuan & Manfaat

Apa Itu Indeks Keinsinyuran Daerah 2026?

Definisi

Ukuran tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan Praktik Keinsinyuran, sesuai **UU RI Nomor 11 Tahun 2014** tentang Keinsinyuran.

Tujuan Utama

- 01** Memetakan penerapan Praktik Keinsinyuran di daerah.
- 02** Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis IPTEK & Inovasi.
- 03** Memberikan pengakuan nasional kepada daerah berkinerja baik.

Manfaat Utama

- 01** Menjamin kualitas & keamanan infrastruktur.
- 02** Mendukung efisiensi anggaran & akuntabilitas.
- 03** Meningkatkan daya saing daerah.

Komponen Pengukuran IKD 2026

Komponen Utama

- 01 URUSAN**
- 02 ASPEK**
- 03 PARAMETER**
- 04 KRITERIA**
- 05 PREDIKAT**

Komponen Pendukung

- 01 BOBOT URUSAN**
- 02 RASIO JUMLAH ASN**

PETA PARTISIPASI DAERAH

Sebaran Partisipasi Provinsi dalam IKD 2026

TOTAL PARTISIPAN

327 Pemda

PERSENTASE CAPAIAN

59,89% dari 546 Total Pemerintah Daerah

RINCIAN PESERTA

37 Provinsi

247 Kabupaten

43 Kota



PETA PARTISIPASI DAERAH

Sebaran Partisipasi Kabupaten / Kota dalam IKD 2026

TOTAL PARTISIPAN

327 Pemda

PERSENTASE CAPAIAN

59,89% dari 546 Total Pemerintah Daerah

RINCIAN PESERTA

37 Provinsi

247 Kabupaten

43 Kota



Contoh Dashboard Suatu Daerah : SDM KEINSINYURAN

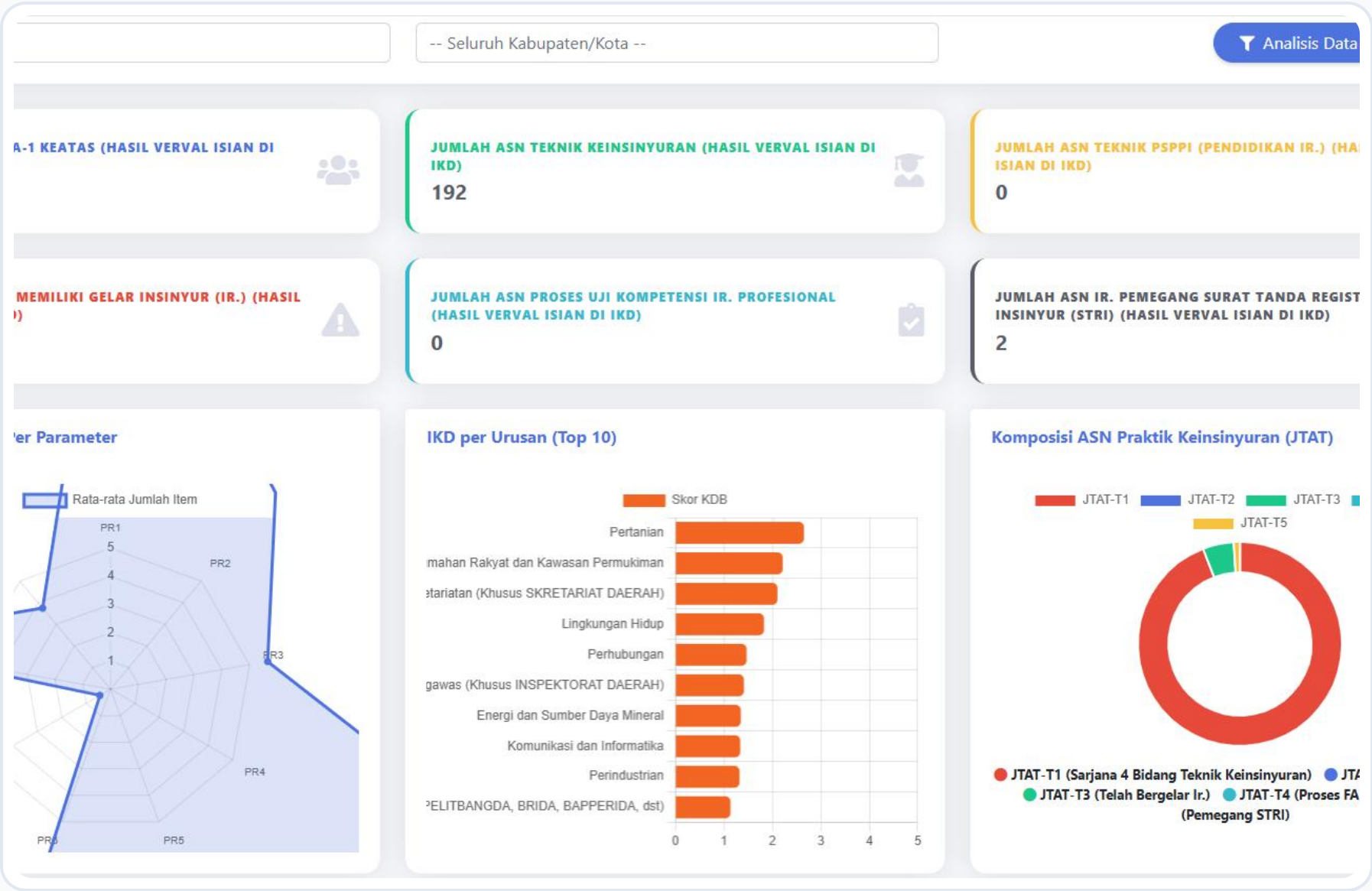
Mayoritas S1 Teknik, Perlu Peningkatan PSPPI, Sertifikasi & STRI

KONDISI SAAT INI

Mayoritas
Lulusan S1 Teknik

REKOMENDASI UTAMA

- ✓ Mengikuti Program Profesi Insinyur (PSPPI) secara aktif.
- ✓ Meningkatkan sertifikasi kompetensi menjadi Insinyur Profesional.
- ✓ Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) resmi.



Contoh Dashboard Suatu Daerah : KINERJA KEINSINYURAN

Sektor Pertanian & Perumahan Pimpin Kinerja Keinsinyuran

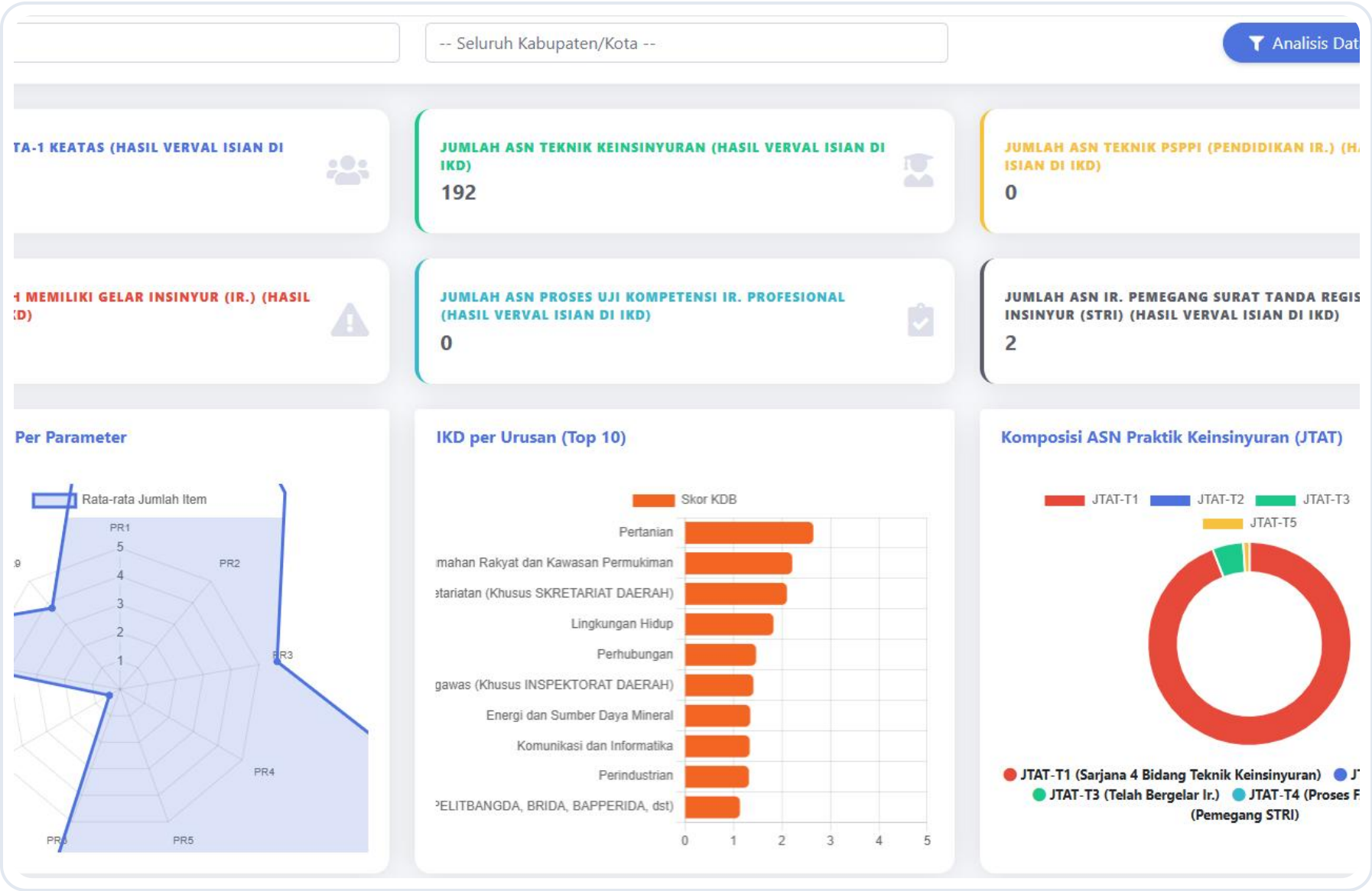
KONDISI & TEMUAN

Urusan Tertinggi
Urusan Pertanian & Perumahan

Diikuti oleh Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (PU Tata Ruang) serta Sekretariat Daerah (Setda).

TANTANGAN UTAMA

Bagaimana dengan PD yang mengampu Urusan dengan banyak proyek Keinsinyuran?
Kinerja Keinsinyuran pada PD teknis dengan banyak proyek Keinsinyuran perlu terus dipantau dan ditingkatkan untuk memastikan standardisasi proyek berjalan optimal.



Contoh Dashboard Suatu Daerah : PARAMETER 7

Parameter# 7 : Perlu Peningkatan - Proyek Keinsinyuran Dirancang & Diawasi Ir Ber-STRI

KONDISI & TEMUAN

PR7 Terendah

Perancangan & Pengawasan Proyek

Setiap proyek pembangunan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Praktik Keinsinyuran wajib dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

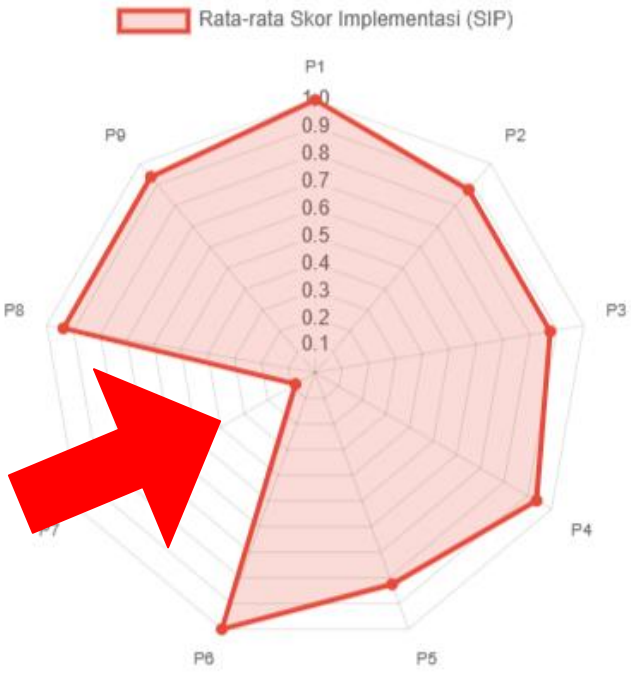
TANTANGAN UTAMA

Bagaimana memastikan kepatuhan standarisasi proyek di daerah?

Perlu pengawasan ketat dan peningkatan jumlah ASN/Insinyur yang tersertifikasi secara resmi untuk meminimalkan risiko teknis di lapangan.

R IMPLEMENTASI PER PARAMETER

Tingl



Keterangan Parameter:

- PR1:** Kebijakan tertulis dari Perangkat Daerah sebagai pelaksana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan/atau Undang Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, beserta peraturan t
- PR2:** Memiliki ASN dengan latar belakang sarjana teknik (4 bic Keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait
- PR3:** Perangkat Daerah memberikan izin dan memfasilitasi ASI bidang) untuk menjadi pengurus dan/atau mengikuti kegiatan
- PR4:** Perangkat Daerah telah melakukan pendataan terhadap , bidang) yang menjalankan Praktik Keinsinyuran terkait kepemi Profesional (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).
- PR5:** Perangkat Daerah memberikan fasilitas/peluang bagi ASI bidang) yang menjalankan Praktik Keinsinyuran untuk meng conference, dan pembelajaran lainnya.
- PR6:** Perangkat Daerah telah memiliki kebijakan tertulis berup. (NSPK) yang mengatur bahwa pelaksanaan pembangunan ber personel Insinyur yang memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- PR7:** Setiap proyek pembangunan Perangkat Daerah yang ber dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki Surat Tanda
- PR8:** Setiap proyek yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan t termutakhir, seperti Smart City, sistem irigasi pintar, infrastruk infrastruktur, sistem transportasi, dan lainnya, sebagaimana ter kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.
- PR9:** Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah pernah n penghargaan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam In Adipura, SPBE, Keberlanjutan, e-Kinerja, e-Evaluasi, e-Monitori dan lainnya).

HASIL PENGUKURAN IKD 2026

3 Potret Hasil Evaluasi Daerah

01. Potret Kekuatan

Kelembagaan & Tata Kelola

Daerah dengan kelembagaan dan tata kelola Keinsinyuran yang baik dan terstruktur.

02. Potret Kesenjangan

Disparitas Wilayah & SDM

Kesenjangan antar wilayah, antar aspek, serta ketersediaan SDM Teknik profesional yang memiliki STRI.

03. Potret Peluang

Intervensi & Sertifikasi

Ruang intervensi dan pembinaan prioritas, termasuk peningkatan jumlah pemilik STRI secara agresif.

TINDAK LANJUT

Pemanfaatan Hasil Pengukuran IKD ke Depan

01. Pemetaan Instrumen Pembinaan

Penyusunan program penguatan kapasitas daerah secara terarah dan terukur.

02. Praktik Baik Fasilitasi & Pertukaran

Replikasi kebijakan dan inovasi Keinsinyuran antar daerah yang sukses.

03. Dukungan Kebijakan & Pusat

Dasar pertimbangan alokasi dukungan teknis dan anggaran yang optimal.